TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAPAK PASAR MALAM

Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang
Kabupaten Pasaman Barat

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RISCA HANNIFAH
NIM. 1910200005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAPAK PASAR MALAM

Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RISCA HANNIFAH
NIM. 1910200005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023/2024

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAPAK PASAR MALAM

Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

RISCA HANNIFAH
NIM. 1910200005

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Nur Sania Dasopang, S.H.,I., M. S.I.	Ihsan Helmi Lubis, S.H.I .M.H.
NIP.198912232019032012	NIP.19921125 202012 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023/2024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Risca Hannifa**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 08 Desember 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi **Risa Hannifa** berjudul **"Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Nur Sania Dasopang, S.H.I.,M.S.I,M.H.
NIP. 198912232019032012

PEMBIMBING II

Ihsan Helmi Rubis, S.H.I.,M.H.
NIP. 199211252020121008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Risca Hannifa
NIM	:	1910200005
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	"Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 08 Desember 2023



Risca Hannifa
NIM. 1910200005

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risca Hannifa

NIM : 1910200005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)"**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 08 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Risca Hannifa

NIM. 1910200005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website : https://fasih.uinsyahada.ac.id Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Risca Hannifa
NIM : 1910200005
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Ketua

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Nurhotia Harahap,M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy.
NIP. 198906042020122007

Nada Putri Rohana, M.H.
NIP. 199602102020122009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 73,25, (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,45 (Tiga Koma Empat Puluh Lima)
Predikat : Sangat Memuaskan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : https://fasih.uinsyahada.ac.id Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B - 1490 /Un.28/D/PP.00.9/08 /2024

JUDUL SKRIPSI	:Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat
NAMA	:Risca Hannifa
NIM	: 1910200005

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 15 Agustus 2024
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Risca Hannifa

Nim : 1910200005

Judu : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan, yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Di Desa Ujung Gading terdapat praktek sewa menyewa lapak yang mengalami perubahan harga secara sepihak setelah terjadinya kesepakatan. Dalam praktek sewa menyewa ini, juga terjadi perbedaan harga antara lapak satu dengan lainnya, hal tersebut menimbulkan adanya rasa ketidak adilan di antara pihak satu dengan yang lainnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian penulis ini adalah, Bagaimana praktek sewa menyewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ? dan Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ?

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa (1) Perubahan harga yang terjadi di pasar malam Desa Ujung Gading tersebut, terjadi pada penyewa yang menambah lapangan lapak untuk tempat permainan saja, sedangkan tidak untuk penyewa lainnya. Perubahan harga yang terjadi pada penyewa yang menambah lapangan tersebut belum sesuai dengan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah, karena hal tersebut melanggar salah satu syarat sah *ijarah* dan juga belum sesuai dengan dasar penetapan harga, karena terdapat ketidak relaan dari pihak yang menambah lapangan lapak untuk tempat permainan. Perubahan harga tersebut terjadi secara sepihak dan dilakukan secara terpaksa di tengah berlangsungnya transaksi sewa-menyewa. (2) Perbedaan harga yang terjadi di pasarmalam Desa Ujung Gading tersebut sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat penetapan harga oleh kompilasi hukum ekonomi syariah. Sewa-menyewa lapak tersebut sudah sesuai dengan penetapan harga yaitu sesuai konsep penetapan harga oleh pemerintah yang adil dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, meski di awal terjadinya perbedaan harga pihak yang berjualan di malam hari sempat merasa kecewa, namun pada akhirnya pihak tersebut menyetujuinya, setelah mendapat penjelasan dari pemilik lapak. Penetapan harga yang terjadi dalam sewa-menyewa lapak tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini agar tercipta keadilan bersama.

Kata Kunci : *Ijarah*, Lapak, Pasar Malam, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penelitian dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Uraian shalawat serta senantiasa terurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut diteladani, pencerahan dunia dari alam kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya, Amiinn.

Skripsi ini berjudul "Kompilasi Hukum Ekonimi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat" Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Syek Hasan Anddary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bakal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penelitian untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Wakil Rektor dibidang Akedemik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor

Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

2. Ibu Nur Sania Dasopang, S.H.I.,M.S.I. sebagai pembimbing I dan Bapak Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.M.H. sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Ibu Nur hotiah Harahap, M.H sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M. A. selaku dosen Panesehat Akademik.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan Terima Kasih Kepada Ayahanda tercintaqu pertama Ikhwan dan ibundaqu tersayangqu Zainab yang telah banyak melimpah pengorbanannya, kasih saying serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surge menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Terima kasih kepada Abang saya, Muhammad Rezki, dan adik saya Nita Fitriana, Ainunkhoiriah, Nopri Adip, Sifa,Riza Anggina yang telah mendidik dan memotivasi tanpa tiada henti, serta dukung doa dan materil yang tiada henti untuk kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu.Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.

10. Terima kasih kepada keluargaqu yang ikut serta memberikan motivasi semangat .
11. Terim kasih kepada kawan yang bernama Melis Mentari, Siti Hajjah Harahap, Winda Sari Siregar, Winda Sari Lubis, Riska KHairani, yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada kawan/ sebagai kak bagiku Nahda yang memberi saran, kritik dan dukungan untuk menyelesaikan deskripsi ini.
13. Teman teman seperjuangan dipakultas syariah dan ilmu hukum, teman selama perkuliahan diruangan hes 1 dan hes 2 angkatan 2019 dan juga teman teman lainnya yang tidak bias saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan dan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir padajenjang strata 1 di UIN SYAHADA PADANG SIDIMPUAN.
14. Las but not least, I wanna thanks me, untuk semua kerja keras ini dan untuk segalanya .

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho allah saw, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada salan dan kritik yang membingungkan akan penulis terima dengan senang hati. Berharab semoga skripsi ini bermanfaan khususnya bagi penulis, pembacca dan masyarakat luas.

PadangSidimpuan, September 2023

Penulis

Risca Hannifa

Nim : 1910200005

PEDOMAN TRANSLET TERASI ARAB- LATIN

Translet terasi arab- latin berdasaran keputusan bersama mentri agama RI dan mentri pendidikan dan kebudayaan RI NO 158/1987 dan 0543B/ U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

a. Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	G	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-

و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
: ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan di tulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.
   : ditulis Jami'ah
2. Bila di hidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.
   : di tulis *ni'matullah*
   : di tulis *zakatul fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis u

E. Vocal Panjang

1. a panjang ditulis a,I panjang ditulis I dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya
2. fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+w awu mati ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*
: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-
   : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya
   : ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

a. Ditulis kata per kata, atau
b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN iv

DAFTAR ISI.....vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Masalah 4

C. Batasan Istilah.....4

D. Rumusan Masalah.....5

E. Tujuan Penelitian 5

F. Manfaat Penelitian 5

G. Kajian Terdahulu.....6

H. Sistematika Pembahasan.....14

BAB II LANDASAN TEORI 15

A. Sewa Menyewa *(Ijarah)*.....*15*

1. Pengertian Sewa Menyewa 15

2. Rukun Sewa Menyewa *(Ijarah)*.....*17*

3. Syarat- syarat Sewa Menyewa *(Ijarah)* *20*

4. Macam-macam Sewa Menyewa *(Ijarah)*.....*26*

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....29

B. Penetapan Harga 30
1. Pengertian Penetapan Harga 30
2. Dasar Hukum Penetapan Harga 31
3. Syarat-syarat Penetapan Harga 32
4. Konsep Harga Yang Adil.....32
C. Wanprestasi.....34
1. Pengertian Wanprestasi.....34
2. Wansperestasi Hukum Islam.....35
3. Bentuk-bentuk Wansperestasi.....37
4. Keadaan Memaksa *(force majeure)*.....*37*
BAB III METODE PENELITIAN.....39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
B. Jenis Penelitian.....39
C. Metode Penelitian 40
D. Sumber Data Penelitian.....40
E. Teknik Pengumplan Data.....42
F. Teknik Pengolahan Data 43
G. Teknik Analisis Data.....43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....45
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 45
B. Prakatek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.....47
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga

antara toko yang satu dengan yang lainnya pada biaya sewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat 60

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

BAB II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Manusia menurut kodratnya harus hidup bermasyarakat. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Sebagai makhluk individu, manusia dituntut untuk mampu hidup bermasyarakat dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, manusia diharuskan untuk saling tolong menolong, saling menghormati, dan saling memberikan kesempatan kepada orang lain.[1]

Hubungan manusia dengan Allah Swt, diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang kompilasi hukum ekonomi syariah. Adapun yang disebut kompilasi hukum secara terminology didefenisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan kedunia. Misalnya, dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan atau perkongsian, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.[2]

Sewa-menyewa merupakan transaksi yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat, sebab kebutuhan manusia semakin meningkat maka transaksi ekonomi salah satunya dalam sewa menyewa disebut dengan *ijarah.* Menurut bahasa sewa menyewa berarti *al-'iwadl* yang artinya ganti atau upah (imbalan). Dengan demikian *ijarah* adalah akad pemindahan

[1] Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan, Cet Ke-1* (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2006), 2-3.

[2] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencanan, 2012), 71-72.

kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan.Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya pengalihan hak atas manfaat suatu objek yang disewakan.[3]

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa harus ada suatu akad atau perjanjian, yakni antara orang yang menyewa dan yang menyewakan. Akad ialah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.[4]

Salah satu praktek sewa menyewa yang menarik bagi penulis ialah praktek sewa menyewa lapak pasar malam yang ada di desa ujung gading. Pasar malam tersebut menyediakan berapa stand untuk disewakan bagi pihak yang ingin berjualan. Pelaksanaan akad sewa menyewa dilakukan antara pihak menyewa lapak dengan pihak pemilik lapak. Bagi siapa saja yang ingin berjualan maka harus menyewa dan membayar uang sewa stand tersebut terlebih dahulu. Ukuran perstand yang disewakan itu sudah dibuat perkotak sehingga lebar dan luasnya itu sama. Dalam sewa menyewa lapak ini, *a'jir* dan *mustakjir* melakukan akad perjanjian secara lisan yang mana sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Mengenai perjanjian tersebut, sistem pembayaran diawal akad yaitu penyewa langsung membayar uang tunai sewa lapak selama 1 tahun sebesar 5 juta seperti penjual balon, odong-odong dan sebagainya itu terdapat tambahan harga. Tambahan harga juga berbeda-beda tergantung besar kecilnya alat permainan dan luas lapak yang dipakai[5].

---

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), 10.

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm, 55.

[5] *Wawancara*, Halomoan, Ujung Gading Pasaman Barat, 1 Juli 2023.

Harga sewa lapak dari penjualan balon sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun, harga sewa lapak odong-odong sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun, harga sewa penjual makanan sebesar Rp. 2.000.000,-/Tahun, harga sewa penjual acsesoris sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun, harga sewa lapak penjual baju sebesar Rp. 1.000.000,-/Tahun.

Namun dalam prakteknya, sewa menyewa lapak di desa ujung gading kecamatan lembah melintang tersebut diduga terdapat penyelewengan, salah satunya terkait adanya perubahan pembayaran listrik secara sepihak harga secara sepihak yang awalnya ditanggung oleh pemilik lapak namun ditengah-tengah perjanjian tiba-tiba berubah yaitu pembayaran listrik semua dibebankan kepada pihak yang menyewa tambahan lapak dan harus dibayarkan setiap seminggu sekali.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad yang benar yaitu akad yang disepakati antara kedua belah pihak tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan. Berkaitan dengan ini kompilasi hukum ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek-aspek dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, salah satunya yaitu aspek kejujuran. Kompilasi hukum islam sangat menentang ketidak kejujuran, kecurangan bahkan praktek pemaksaan dari semua perbuatan yang mengandung ketidak jelasan.[6]

Selanjutnya mengenai perbedaan harga antara lapak satu dengan lapak yang lain, yang mana pembayaran yang menyewa lapak itu pertahun sebesar RP. 5.000.000,-. Dan sudah termasuk pembayaran listrik, namun pada kenyataannya setelah 3 bulan masa sewa lapak berjalan, pihak pemilik lapak meminta uang pembayaran listrik sebesar Rp. 100.000,-/minggu, sementara perjanjian sewa lapak di awal tidak disebutkan pembayaran listrik untuk setiap minggunya. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah syarat sah *ijarah* upah

[6] M.Ali Hasan,"*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,"(*Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2004),Hlm. 169.

(*ujrah)* harus jelas, tidak boleh adanya unsur *gharar* (ketidak jelasan harga) karena dalam penetapan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "**KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat**".

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada praktik sewa menyewa lapak pasar malam yang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah serta bagaimana praktik akadnya.

C. Batasan Istilah

1. Sewa Menyewa (ijarah) adalah akad pemindahan hak guna/ manfaat atas suatu barang/ jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
2. Lapak adalah tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
3. Pasar malam adalah tempat berlangsungnya berbagai-bagai pertunjukan (kedai, rumah makan, dan sebagainya), diadakan pada malam hari untuk beberapa hari lamanya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek sewa menyewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariahterhadap Perbedaan harga antara toko yang satu dengan toko yang lainnya pada biaya sewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Keccamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan harga toko yang satu dengan toko yang lainnya pada biaya sewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah sewa menyewa.
2. Sebagai bahan perbandingan pada penelitian lain.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

G. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang lapak pasar malam yaitu:

1. Skripsi Ade Mareta Handayani pada tahun 2019 dengan judul **“ Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat “** masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pelaksanaan sewa menyewa lapak pasar adanya perbedaan harga

antara pihak penyewa, yaitu pihak penyewa dari penduduk asli Desa Gunung Agung dan penduduk luar Desa Gunung Agung. Sedangkan masalah yang diteliti penulis dalam skripsi ini adalah sewa menyewa lapak di desa ujung gading kecamatan lembah melintang tersebut diduga terdapat penyelewengan, salah satunya terkait adanya perubahan pembayaran listrik secara sepihak.

Rumusan masalah Ade Mareta Handayani adalah bagaimana perbedaan harga sewa lapak pasar Unyil di Desa Gunung Agung. Sedangkan masalah skripsi penulis adalah sewa menyewa lapak di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang tersebut diduga terdapat penyelewengan.

Hasil penelitian Ade Mareta Handayani menunjukkan bahwa harga lapak pasar malam Unyil, terdapat perbedaan harga berdasarkan domisili atau tempat tinggal pihak penyewa.Perbedaan harga tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat asli desa yang menyewa lapak sedangkan hasil penelitian penulis berlangsung ijarah tentang sewa menyewa lapak pasar malam didesa ujung gading kecamatan lembah melintang kabupaten pasaman barat, namun dalam beberapa hal terdapat sesuatu yang sepertinya harus ditambahkan demi tercapainya prinsip kompilasi hukum ekonomi syariah secara utuh, seperti membuat perjanjian tertulis dalam perjanjian awal dan lain sebagainya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, karena metode ini dirasa sangat relevan dengan objek penelitian. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian data tersebut diformasikan dan diintrepresikan sehingga tersusun rapi menjadi satu. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustakaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum islam tentang perbedan harga sewa lapak pasar di Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementaran penelitian penulis membahas tentang sewa menyewa lapak pasar malam dan menjelaskan bagaimana kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.[7]

2. Skripsi Lia Lukita Heryanti pada tahun 2019 dengan judul **" Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tenggah "** masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah sewa menyewa yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perjanjian yaitu hak kepemilikan objek yang disewakan merupakan bukan hak sendiri untuk diambil manfaatnya secara leluas tanpa sepengetahuan pemilik aslinya yang sah secara hukum. Sedangkan masalah yang diteli penulis dalam skripsi ini adalah mengenai perubahan pembayaran listrik yang awalnya ditanggung pemilik lapak pas ditengah perjalanan pembayaran listrik ditanggung oleh menyewa lapak.

   Rumusan masalah skripsi Lia Lukita Heryanti adalah sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah hukumnya tidak sah menurut hukum positif maupun hukum islam karena objek yang disewakan bukan milik sendiri secara luas tanpa tanpa sepengetahuan pemilik aslinya yang sah secara hukum. Serta kekuatan hukum sewa menyewa yang dilakukan masih lemah

[7] Ade Mareta Handayani, *" Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak Desa Gunung Agung Keamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat "* Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm.18.

dikarenakan perjanjian sewa menyewa lapak secara lisan, tanpa ada bukti tertulis. Sedangkan skripsi penelitian adalah adanya perubahan pembayaran listrik yang awalnya ditanggung oleh pemilik lapak namun ditengah-tengah perjalanan perjanjian berubah yaitu pembayaran listrik ditanggung dan dibebankan kepada yang menyewa lapak.

Hasil penelitian Lia Lukita Heryanti adalah bahwa kegiatan sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah hukumnya tidak sah menurut hukum positif maupun hukum islam. Sedangkan hasil penelitian penulis adalah Hal tersebut dikarenakan sewa menyewa yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perjanjian yaitu hak kepemilikan objek yang disewakan merupakan bukan hak milik sendiri untuk diambil manfaatnya secara leluas tanpa sepengetahuan pemilik aslinya yang sah secara hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan metode lapangan sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan berfikir induktif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini meneliti tentang bagaimana akad sewa lapak pedagang kaki lima di jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tenggah sementara penulis membahas tentang sewa menyewa lapak pasar malam dan menjelaskan bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syaraih

terhadap perbedaan harga toko yang satu dengan toko yang lain pada biaya sewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.[8]

3. Skripsi Fauzan Nur pada tahun 2019 dengan judul **" Analisi Praktek Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam "** masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah factor-faktor pedagang untuk menyewa lapak di area tersebut, bagaimana mekanisme transaksi dalam praktek sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di Rukoh Banda Aceh. Sedangkan masalah yang diteliti penulis dalan skripsi adalah akad yang disepakati kedua belah pihak tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan mengenai perubahan harga dan perbedaan harga antara lapak satu dengan lapak lainnya.

   Rumus masalah skripsi Fauzan Nur adalah bagaimana mekanisme transaksi dalam praktek sewa menyewa lapak pedagang kaki lima di Rukoh Banda Aceh dan pandangan hukum islam terhadap praktek pengaturan tempat sewa menyewa lapak. Sedangkan skripsi penelitian adalah sementara perjanjian sewa lapak di awal tidak disebut pembayaran listrik untuk setiap minggu.

   Hasil penelitian Fauzan Nur adalah praktek transaksi sewa menyewa lapak sebagaimana yang terjadi disekitar jalan Utama Rukoh dapat dikatakan tidak relevan dengan hukum islam, dimana lapak (tempat) yang dijadikan objek transaksi ijarahmerupakan bukan hak milik sempurna dari penyewa (musta'jir), akan tetapi tempat tersebut merupakan saran umum yang berada dibawah payung kewenangan

[8] Lia Lukita Heryanti*," Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandar Jaya Lampung Tengah," Skripsi* (IAIN Metro, Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15AIringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung, 2019), hlm. 15.

pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan hasil penelitian penulis adalah ada perbuhan pembayaran lapak pasar malam di Desa Ujung Gdaing Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriftif kualitatif, karena metode ini dirasakan sangat relevan dengan objek penelitian. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian data tersebut diformulasikan dan di intreprestasikan sehingga tersusun rapi menjadi satu. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tertulis yaitu, penelitian ini tentang menganalisis tentang penggunaan area public yang digunakan sebagai objek transaksi dalam praktek sewa menyewa dalam pandangan hukum islam sedangkan penelitian penulis ini lebih difokuskan kepada praktek sewa menyewa lapak pasar malam yang dikompilasikan hukum ekonomi syariah serta bagaimana praktek akadnya.[9]

4. Jurnal Muhammad Iqbal Fauzan, Redi Hadiyanto, Iwan Permana pada tahun 2023 dengan judul **“ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Lapak di Pasar Banjar Kabupaten Bandung “** masalah yang diteliti didalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sewa lapak dipasar Banjaran, sedangkan masalah yang diteliti penulis dalam skripsi ini adalah perubahan harga dengan perbedaan harga dengan satu dan lainnya.

[9] Fauzan Nur,” Analisis Praktek Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* (UIN AR-RANIRY, Darussalam Banda Aceh,2019), hlm. 4.

Rumusan masalah jurnal Muhammad Iqbal Fauzan, Redi Hadiyanto, Iwan Permana adalah bagaimana praktek sewa menyewa dipasar banjar, kegiatan yang dilarang oleh syariat islam dengan melakukan menyewa lapaknya lagi tanpa seijin pemilik lapak. Sedangkan masalah skripsi penelitian penulis adalah perbedaan harga dengan lapak yang lainnya.[10]

Hasil penelitian Muhammad Iqbal Fauzan, Redi Hadiyanto, Iwan Permana adalah bahwa terdapat para penyewa lapak yang tidak memenuhi syarat akad ijarah dikarenakan para penyewa lapak menyewakan kembali lapaknya tanpa seizing pemilik lapak sedangkan hasil penelitian penulis adalah tentang sewa menyewa lapak pasar malam yang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah serta bagaimana praktik akadnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena metode ini dirasa sangat relevan dengan objek penelitian. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian data tersebut diformulasikan dan di intreprestasikan sehingga tersusun rapi menjadi satu. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustakaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini menelitian tentang bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sewa lapak di pasar banjar dengan menggunakan teori akad ijarah.Sedangkan perbedaan penulis adalah sewa menyewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading menurut kompilasi hukum

[10] Muhammad Iqbal Fauzan dkk,*" Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Lapak Di Pasar Banjar Kabupaten Bandung,"* Jurnal Universitas Islam Bandung Indonesia, (2023), hlm.229.

ekonomi syariah dalam perubahan harga dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat diawal.

5. Jurnal Dea Paramita Adriani pada tahun 2021 dengan judul **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemungutan Sewa Menyewa Lapak Pasar Tradisional “** masalah yang diteliti didalam skripsi ini adalah perbedaan harga sewa lapak yang terjadi di pasar tradisional Limbana, dimana petugas pasar mengutip biaya sewa lapak pasar kepada penyewa yang berasal dari luar Nagari limbanan itu sendiri. Sedangkan masalah yang diteliti penulis dalam skripsi ini adalah adanya pihak yang merasakan dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan dalam pembayaran stand di pasar malam Ujung Gading Kecamatan Lembaha Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

   Rumusan masalah jurnal Dea Paramita Adriani adalah perbedaan harga sewa lapak yang terjadi dipasar tradisional Limbanan, dimana petugas pasar pengutipan biaya sewa lapak pasar kepada penyewa yang berasal dari rual nagari Limbanan lebih tinggi dibandingkan dengan penyewa dipasar dari nagari Limbanan itu sendiri. Sedangkan masalah skripsi penelitian penulis adalah perjanjian sewa lapak pasar malam di awal tidak disebut pembayaran listrik untuk setiap minggu pas di pertengahan bulan harus bayar uang listrik perminggu.[11]

   Hasil penelitian Dea Paramita Adriani adalah bahwa perbedaan harga sewa yang diterapkan oleh pengelolaan pasar berdasarkan tempat tinggal para penyewa kurang lazim untuk dilakukan karena mengandung unsur kedzaliman dan ketidak adilan sedangkan hasil penelitian penulis adalah tentang perubahan pembayaran listrik namun

[11] Dea Paramita Adriani,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemungutan Sewa Menyewa Lapak Pasar Tradisional,” Jurnal Riset Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, (2021), hlm.120.

pada kenyataannya setelah 3 bulan masa sewa lapak berjalan, pihak pemilik lapak meminta uang pembayaran listrik perminggu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena metode ini dirasa sangat relevan dengan objek penelitian. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dara tersebut diformulasikan dan di intreprestasikan sehingga tersusun rapi menjadi satu. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustakaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini meneliti tentang perbedaan harga sewa yang diterapkan oleh pengelolaan pasar berdasarkan tempat tinggal para penyewa kurang lazim untuk dilakukan karena menggandung usur kedzaliman dan ketidak adilan. Sedangkan penelitian penulis adalah fokuskan kepada praktek sewa menyewa lapak pasar malam yang ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah serta bagaimana dengan praktek akadnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini, adapun gembaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:[12]

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasaan.

[12] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial,(Kuantitatif dan kualitatif*)..,hlm.231.

Bab II merupakan bab kajian teori mengenai Sewa Menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, macam-macam sewa menyewa, dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan sewa menyewa.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

Bab VI merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang penyelesaian masalah Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Bab V merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa (*Ijarah)*

1. Pengertian Sewa Menyewa *(Ijarah)*

Menurut bahasa kata sewa-menyewa berasal dari kata "Sewa" dan "Menyewa", kata "sewa" berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa. Sedangkan kata "menyewa" berarti memakai dengan membayar uang sewa. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.[13]

Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ini banyak sekali dilakukan oleh manusia, baik manusia jaman dahulu maupun manusia jaman sekarang, atau dapat diartikan bahwa semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, kecuali apabila dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan.[14]

Ijarah adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *Ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay'u al-manfa'ah*), sedangkan menurut syara' ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, Jumhur Ulama mengatakan bahwa menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian juga, menyewakan makanan untuk dimakan, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan barang yang dapat ditakar dan timbangan karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu. Jika menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al-'ain* atau sewa menyewa seperti sewa menyewa rumah untuk

---

[13] Akhmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018),49.

[14] A. Mas'adi Ghufron, *Figh Muamalah Kontekstual*, (Semarang : Rajawali Pers, 2002), hlm. 181

ditempati. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut saru istilah dalam literartur ‘Arab yaitu *ijarah*.[15]

Salah satu *ijarah* adalah *ujrah* (upah) yaitu, suatu harta yang diberikan sebagai kompensasi pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yang dapat dimanfaatkan. Adapun rukun *ujrah* yaitu, adanya keridhaan kedua belah pihak, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, objek dapat dimanfaatkan menurut kriteria *syara*, adanya manfaat, manfaat yang mubah bukan haram, besar upah yang dibayarkan harus jelas, wujud upah harus jelas, waktu pembayaran upah harus jelas.

Pada dasarnya dan awalnya ijarah terjadi pada penyewaan tanah/ ladang untuk kemudian membayar uang upah/sewanya, tetapi konsep ijarah berkembang/ melebar dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah pakar, guru, kenderaan/transportasi, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan suatu akad atau perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut, karena jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam akad maka sewa menyewa tersebut bias berakhir. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan) yang mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada sewa menyewa berlangsung.

Menurut Idris Ahmad ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu’jir dan musta’jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah). Sedangkan Kamaluddin A. Marzuki menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa.[16]

Dari penjelasan sewa-menyewa tersebut dapat penulis rumuskan bahwa sewa menyewa (*ijarah*) adalahorang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu’jir* dan *mus’tajir. Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Mus’tajit* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Bagi yang berakat *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat

[15] Ali Imran Sinaga, *Fiqih* 1, (Bandung, itapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 181.

[16] Darwis Harahap dkk, *Fiqih Muamalah* 1, (Medan, CV. Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021), hlm. 133.

barang yang dijadikan adakad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak keil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

2. Rukun Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Rukun sewa menyewa *(ijarah)* sebagai sesuatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut ulama hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan).

Adapun rukun *ijarah* ini adalah:

a. Penyewa dan orang yang menyewakan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang menyewakan adalah:
   1) Mengijinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewa.
   2) Memilihara keutuhan barang yang di sewakan. Adapun, kewajiban bagi penyewa sebagai berikut :
      a) Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
      b) Membersihkan barang sewaannya.
      c) Mengembalikan barang sewaannya itu bila habis temponya.
      d) Sewaan yang disyaratkan dapat diketahui dengan jelas jenisnya, ukurannya, dan sifatnya. Manfaat yang disyaratkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain seperti berharga, berjangka waktu, dan dapat diserah terimakan.

b. Orang yang berakad (*Aqid*), yaitu :
   1) *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan.
   2) *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

Bagi *Mu'jir* dan Musta'jir, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.[17]

a. Sighat Akad

Mu'jir dan *Musta'jir* melakukan ijab dan qabul dengan ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.[18]

Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan "suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu". Sedangkan *qobul* adalah "suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab".

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

b. upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir.* Dengan syarat, sebagai berikut:

1) jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

---

[17] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), *jilid* 4, hlm. 205

[18] Akhmad Farroh Hasan, *Figih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),* UIN-Malik Malang Press, 2018, hlm. 53-53.

3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap".[19]

3. Syarat-Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*), yaitu keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Jumhur ulama berbeda berpendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *ijarah*. Ulama kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijarah* harus dilakukan seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kelengkapan harus di jadikan sebagai syarat. Adapun syarat-syarat *ijarah* ini adalah:

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, zat akad dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimai tujuh tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah.* Adapun baligh adalah syarat penyerahan. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal sedangkan mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

b. Syarat pelaksanaan

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. dengan demikian *ijarah alfudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

[19] Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:1999), hlm. 178

c. Syarat sah *ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'aqid ma'qud 'alaih, ujrah* dan zat akad. diantara syarat sahnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad *('An-taradin)*

Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Bahwa di dalam perjanjian sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.[20]

2) *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

a) *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil. Atau dipandang tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara.

b) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara',*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkaraperkara yang dibolehkan syara,' seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau

[20] Nadhira Wahyu Adityarini dan Lanang Sakti, "*Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,"* Jurnal *Fundamental Justice*, 2 (2020), hlm. 44.

menyewakan jaring untuk memburu. Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.

c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Di antara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-lain. juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

d) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidakmengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

e) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.

f) Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alaih*). Ada beberapa syarat

dari manfaat *ma'qud 'alaih* yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Dibolehkan, maka sesuatu yang dilarang tidak sah menjadi manfaat dalam akad *ijarah*.
2) Menerima manfaat melalui *mu'awadlah.*
3) Manfaat harus bernilai.
4) Dimiliki.

5) Tidak mengharuskan memberikan benda, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya.
6) Dapat diserahkan.
7) Harus benar-benar memberikan manfaat bagi *musta'jir*. Maka tidak sah mengupah seseorang untuk melaksanakan shalat fardhu bagi dirinya.
8) Diketahui, yakni ada kejelasan mengenai spesifikasi dan kadarnya. [21]
9) Syarat *ujrah,* yaitu sebagai berikut:

(a) *Ujrah* harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui.

Tidak sah menurut Syafi'iyah apabila mengupah atau menyewa seseorang yang dibayar dengan diberi pakaian dan makanan, sebab kadar nilainya tidak diketahui. Namun demikian, Ulama Hanafiyah memperbolehkan hal tersebut berdasarkan istihsan. Ulama juga berbeda pendapat tentang *ujrah* yang merupkan bagian dari *ma'qud 'alaih*. Jumhur mengatakan bahwa menjadi fasid akad *ijarah* yang demikian, seperti orang yang menguliti binatang sembelihan kemudian diupah dengan dedak padi yang dihasilkan, sebab kadar nilai dari *ujrah* tersebut tidak diketahui. Akan tetapi Malikiyah mengatakan bahwa jika *ujrah* yang merupakan bagian dari *ma'qud 'alaih* dapat diketahui kadar nilainya, maka hal tersebut boleh dilakukan.

[21] Firman Setiawan, " *Al- Ijarah Al- A'mal Al- Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*," Dinar, 2 (2015), hlm . 114.

(b) *Ujrah* tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih.*

Seperti menyewa tempat tinggal dengan *ujrah* tempat tinggal, menyewa jasa dengan *ujrah* jasa dan menyewa kendaraan dengan *ujrah* kendaraan. Menurut Hanafiyah syarat ini merupakan cabang dari pelanggaran riba. Mereka mengibaratkan satu jenis tersebut pada illat keharaman riba. Tetapi menurut Syafi'iyah, illat riba tidak terwujud hanya dengan semata-mata satu jenis, sebab illat riba ada dua, yaitu satu jenis dan barang ribawi. Dengan demikian, ujrah yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* adalah diperbolehkan, dan ujrah tidak harus disyaratkan dengan syarat ini.

1. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut yaitu:

a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b. Tidak ada *udzur* yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya *udzur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *udzur*. *Udzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. uzur dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

1) *Udzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
2) *Udzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
3) *Udzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul- *Ijarah* dapat batal (*fasakh*) dikarenakan beberapa hal, yaitu:[22]

a. Barang itu mengalami cacat ketika sudah dipergunakan penyewa dalam beberapa waktu.
b. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah atau mobil.

[22] Hafsah, *Fiqih*, (Bandung, Citapustaka Mediasi Perintis, 2011), hlm. 112.

c. Berakhirnya waktu/masa pengguna barang sewaan sesuai dengan perjanjian.

4. Macam-Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Berdasarkan definisi dan syarat *ijarah*, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

a. *Ijarah 'ala al-manafi'*

Ijarah 'ala al-manafi' yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain- lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembagan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak menganggu dan merusak barang yang disewakan.

Namun demikian, ada *akad ijarah ijarah 'ala al-manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut yaitu:

1. *Ijarah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukkannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah *(mu'jir)* memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
2. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukkannnya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.[23]

b. *Ijarah 'ala al-'amal ijarah*

Yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ijarah* '*ala al-'amal* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Ijarah Khas*

   Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Sedangkan pengertian *ajir khas* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.[24]

[23] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.
[24] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 133.

Ajir khas sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak , ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya

2. *Ijarah Musytarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakuka secara bersamasama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain. Adapun *ajir musytarik* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan hukum.[25]

Hukum positif sewa menyewa terhadap dalam pasal 1548 KUH Perdata berbunyi sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang,selama suatu waktu tertentu. Sedangkan pasal 1576 adalah dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewa barang, jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.

[25] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan harus dipenuhi oleh pihak yang menyewa atau yang menerima sewa.

a.Pihak yang menyewakan *(Mu'ajir)*

1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si
2) penyewaMemelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
3) Memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa
4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacatan dari barang yang disewakan yang merintangi pemakaian barang
5) Ia berhak atas barang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan
6) Menerima Kembali Barang obyek perjanjian di akhir masa sewa

b.Pihak penyewa *(Musta'jir)*

1) Ia wajib memekai barang yang disewa
2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan
3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya
4) Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang disewakan
5) Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa

B. Penetapan Harga

1. Pengertian Penetapan Harga

Harga merupakan tolak ukur nilai suatu barang atau jasa yang dalam bentuk sejumlah uang. Dengan uang tersebut seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan akan menyerahkan barang atas jasa kepada pihak lain. Harga dalam bahasa inggris dikenal dengan *price,* sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka *(an-taradin)* pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. Adapun *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai atau barang jasa dalam satuan uang. Harga dapat berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan manfaat.[26]

Rachmat Syafe"I berpendapat bahwa, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harag dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak.[27] Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara- yas'aru- sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi, kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as- si'r* yang berarti penetapan harga. Kata *as- si'r* ini digunakan di pasar untuk, menyebut harga di pasar sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.[28] Adapun *tas'ir* secara terminologis adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat.

---

[26] Rozalinda, *Ekonomi Islam* : *Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 154.

[27] Rachmat Syafe, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 87.

[28] Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), 118.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *ta'sir* adalah penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Negara melakukan intervensi atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

2. Dasar Hukum Penetapan Harga

Fuqaha sepakat bahwa pada dasarnya *tas'ir* adalah haram. Hal ini berdasarkan argumentasi dari al-Qur‟an dan hadits. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa' : 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. "

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah Saw, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rosulullah Saw, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang.[29]

[29] Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin : IAIN ANTASARI PRESS, 2015), 47.

Jadi harga tidak bisa diperbaiki tanpa persetujuan dan kesepakatan. Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mengetahui, dengan cara ini kepentingan penjual dan pembeli memperbaiki harga yang dapat memberikan keuntungan dan memenuhi kebutuhan serta tidak memberatkan rakyat.

3. Syarat- Syarat Penetapan Harga

Ulama fiqh mendeskripsikan syarat-syarat dalam penetapan harga yakni :

a. Barang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat luas.
b. Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga barang dagangan mereka.
c. Pemerintah itu merupakan pemerintahan yang adil.
d. Pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan melakukan kerjasama dengan para pakar ekonomi.
e. Penetapan harga ini harga memikirkan para pedagang dan pembeli agar tidak merugikan salah satu pihak, karena para pedagang juga mencari keuntungan.
f. Harus adanya pengawasan dari pihak pemerintah baik menyangkut harga barang maupun stok barang sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang khususnya mendekati hari-hari besar.
g. Pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang tentunya masih berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan bersama.

4. Harga yang Adil

Hukum kompilasi ekonomi syariah sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penetapan harga dalam sebuah transaksi. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harus juga mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan

hukum kompilasi ekonomi syariah transaksi harus dilakukan secara suka sama suka dan memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.[30]

Dalam hukum kompilasi ekonomi syariah keadilan adalah hal yang paling penting dari transaksi atau jual beli (muamalah) bahkan seluruh jenis akad atau transaksi. Di dalam Al-Qur‟an adil merupakan tujuan samawi dan merupakan salah satu asma Allah Swt. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam QS Al-Maidah (5):8 yang berbunyi:

اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

> *"Berlaku yang adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Kebalikan sifat yang adil adalah zalim, Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al-qur‟an sangat menekankan perlunya keadilan. Adil sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rosulullah Saw menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. mengatur agar persaingan pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidak adilan itu dilarang.

Konsep harga yang adil menurut Ibn Taymiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang menganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang menganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*, sebab harga

[30] Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 139.

pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar, Ibn Taymiyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya supply barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.[31]

Menurut Yusuf Qardhawi, harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan yang haram. *Tas'ir zalim* adalah *tas'ir* yang dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan keadilan bagi masayarakat seperti ketika pedagang menshan barang, padahal masyarakat sangat memerlukannya, maka penetapan harga oleh pemerintah dalam konteks seperti ini diperbolehkan.

C. Wansperestasi

1. Pengertian wansperestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, di mana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih

[31] Euis Amalia, " Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Prespektif Ekonomi Islam, "*Jurnal Al- Istisqhad*, (Januari, 2013), 9.

dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik.[32]

Berdasarkan arti dari wanprestasi, yaitu sikap seseorang yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya. Sebagaimana yang sudah tertulis pada surat perjanjian antara debitur dan juga kreditur. Sedangkan menurut pernyataan dari wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang lewat dari waktu yang sudah dijanjikan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga mengakibatkan keharusan untuk debitur membayar atau memberikan ganti rugi. Karena adanya wanprestasi dari pihak debitur, maka pihak kreditur bisa melakukan penuntutan pembatalan perjanjian. Lain lagi dari penuturan Prodjodikoro (2000) yang menyebutkan wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi pada hukum perjanjian. Oleh karena itu, suatu hal wajib dilakukan sebagai isi dari surat perjanjian.

2. Hukum Islam Wansperestasi

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasarkan dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam ccara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

---

[32] Rachmat, S.S. Seomadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa* (Gramedia Jakarta, 2010), hlm. 27-28.

Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul, maka selanjutnya hukum islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran, Sehingga peraktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wansperestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Kelalaian Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan saksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak milik sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya. Hukum Islam tentang wansprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.[33] Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).

[33] Yuni Herlina dan Hellen Lastfitriani,*Kajian Hukum Islam Tentang Wnsprestasi (Ingkar Janji)*, Vol XVII No. 1 Juni, Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2017), hlm. 12-14.

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Terdapat tiga bentuk wanprestasi:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Seorang debitur yang memiliki suatu prestasi terhadap si kreditur tetapi tidak melaksnakan prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan. Dalam hal ini debitur telah dikatakan wanprestasi jika hal itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibanya.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Seperti yang sudah di contohkan di atas bahwa pelaksaan mengenai waktu prestasi adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah di tetapkan didalam perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi dapat dikatan prestasi sesuai dengan keingina si kreditur.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.

Debitur melaksanakan suatu prestasi tetapi dalam pelaksaannya debitur melaksanakan apa yang berbeda dari isi perjanjian.

4. Keadaan memaksa *(force majeure)*

Keadaan Memaksa dimana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.Beberapa pakar membahas akibat hukum dari keadaan memaksa.

Istilah yang digunakan untuk menyebut *force majeure/overmacht* adalah keadaan memaksa meskipun para ahli hukum telah menerjemahkan terminologi itu dengan keadaan memaksa, dalam pembahasan masih juga menggunakan terminologi *overmacht*.[34]

Dasar ajaran *force majeure/overmacht* subjektif adalah *difficultas* (kebalikan dari impossibilitas). Misalnya : Sesudah diadakan perjanjian jual-beli secara tiba-tiba, terjadi kenaikan harga barang yang tidak dapat diduga lebih dahulu sehingga untuk memenuhi kewajibannya melever barang, si penjual harus membeli barang yang harus di-lever tersebut dengan harga yang sangat tinggi namun kedua ajaran di atas tidak ada artinya jika tidak dilengkapi dengan ajaran risiko.Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa *(force majeure atau overmacht).*

[34] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985,hlm.14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneli berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum pada strata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta salah satu desa yang memiliki masalah dalam praktek sewa menyewa lapak pasar malam.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai bulan Oktober 2023.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research).* Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksa atau pengajuan yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang tujuannya untuk meneliti sesuatu yang terjadi didalamnya masyarakat.[35]

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penelitian adalah tentang sewa menyewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

[35] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alvabeta, 2010), hlm. 25.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriftif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Selanjutnya semua data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.[36]

Metode penelitian digunakan untuk mendeskripsikan praktik sewa menyewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dari hasil wawancara dengan informasi yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemilik lapak dari penyewa lapak. Penelitian melakukan wawancara langsung kepada pemilik lapak dan penyewa lapak mengenai sewa-menyewa lapak di pasar malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Data yang diperoleh dari pemilik lapak dan penyewa lapak terkait terjadinya perubahan harga pada biaya sewa lapak pasar malam dan terjadi perbedaan harga sewa lapak satu dengan lapak lainnya di pasar malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman

[36] Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

Barat. Jumlah informan yang menjadi pemilik lapak yaitu 1 orang sedangkan informan dari penyewa lapak berjumlah 9 orang.[37]

Selain wawancara, sumber hukum primer lainnya, penulis dapatkan dari Al-qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), KUHPerdata, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh seccara tidak langsung melalui media perantara atau diperolah secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data skunder yang diperoleh oleh peneliti ini berupa data dari dokumen-dokumen yang berkenaan tersebut, seperti data-data yang didapat dari kantor Desa Ujung Gading, buku-buku yang relevan dengan mengenai seperti buku yang dibawah ini ditulis oleh:

a. Salim dengan judul Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.
b. Akhmad Farroh Hasan dengan judul Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek).
c. Rahmat Hidayat dengan judul Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
d. Umi Hani dengan judul Fiqih Muamalah.
e. Brs. Sapiudin Shidiq dengan judul Fiqih Muamalat sewa menyewa lapak serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai relevansi dengan tema yang dibahas.

[37] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm28.

5. Data Tersier

Data tersier adalah data yang penelitian digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:[38]

a. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan sewa-menyewa lapak pasar malam Desa Ujung Gading Kematan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yang terjadi, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi kuat dan realitas lengkap dan jelas.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan wawancara mencari metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau responden atau orang yang mau diminta tanggapan dari pertanyaan tentang lapak pasar malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.[39]

---

[38]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Persada, 2003),hlm.184.

[39] Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006),hlm.208.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagain besar data berbentuk surat, catatan harian, arsif foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah motede dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.

7. Teknik Pengolahan Data

Maksud dari teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Kualitatif yaitu dengan membuatkan suatu urian data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara teratur, logis serta efektif. Teknik pengolahan data ini dilakukan agar memudahkan pemahaman serta interpretasi data. Cara pengolahan data dalam penelitian antara lain :

a. *Editing* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah dikumpulnya data dari lapangan.

b. C*lassifying* yaitu agar peneliti lebih sistematis, sehingga hasil penelitian wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yang biasanya di klasifikasikan berdasarkan pertanyaan yang sudah dicantumkan dalam rumusan masalah.

c. *Verifikasi* yaitu mengecek data dengan tujuan agar diketahuinya keabsahan data yang sudah dikumpul. Tahapan ini merupakan tahapan pembuktian dengan mencocokkan hasil wawancara sebelum dilakukan penulis.[40]

[40] Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian,* (Bandung : Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam penganalisi data yang bersifat kualitatif akan melakukan tiga tahap yaitu *data reduction, data display* dan *concludion draing verivikasion.* Ketiga tahapan tersebut dideskripsikan sebagai berukut:[41]

a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
b. Penyajian data (*data display*) penelitian mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian dating yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concludion draing and verivikasion*), pada tahap ini penelitian berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.
d. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematik supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

[41] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),hlm.231.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Ujung Gading

Nagari Ujung Gading ialah salah satu Nagara yang ada di wilayah Kecamatan Lembah Melintang tepatnya Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Ujung Gading dikepalai seorang Wali Nagari yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintah, kesejahteraan, kependudukan. Sumber Utama penghasilan masyarakatadalah bertani.

Wali Nagari diberi wewenang untuk membentuk perangkat organisasi di bawah nagari yaitu, kepala jorong. Adapun luas wilayah Nagari Ujung Gading mencapai 263,77 $km^{2.}$ Batas-batas wilayah di Nagari Ujung Gading yaitu sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tapanuli Selatan
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Aur
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Parit
d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Nagari Sungai Aua

2. Jumlah Penduduk Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang

Jumlah penduduk Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Desa Ujung Gading

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Total
1.	Desa Ujung Gading	330	346	
Jumlah				1477

Dari tabel di atas tercatat sebanyak 1245 jiwa dengan perincian 330 jiwa laki-laki dan 346 jiwa perempuan. Dihitung berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), Desa Ujung Gading dihuni 346 Kepala Keluarga.

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Bila ditinjau dari mata pencarian penduduk Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. II Mata Pencarian

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10
2.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1
3.	Petani	234
4.	Karyawan Swasta	15
5.	Buruh	5
6.	Pembantu Rumah Tangga	1
7.	Pangkas Rambut	2
8.	Penjahit	1
9.	Guru	9
10.	Perawat	2
11.	Supir	4
12.	Pedagang	10
13.	Mengurus Rumah Tangga	150
14.	Pelajar/Mahasiswa	100
15.	Pensiunan	3
16.	Bidan	1
	Total	1.010

Tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk Desa Ujung GadingKecamamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak mengurus rumah tangga, kemudian disusul dengan profesi petani.

B. Prakatek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Dalam melakukan suatu transaksi sewa-menyewa, harga adalah suatu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan harga sewa menyewa lapak yang dilakukan di pasar malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ini merupakan bentuk kesepakatan negosiasi atau tawarmenawar yang dilakukan antara calon penyewa dan pemilik sewa. Sebelum kesepakatan tersebut terjadi dalam akad perjanjian, pemilik lapak pasar sudah menetetapkan besaran biaya pertahunya.

Letak Desa Ujung Gading berada didaerah yang strategis, Desa Ujung Gading merupakan Desa yang masih tergolong dekat dengan letak perbukitan. Desa Ujung Gading merupakan desa dengan letak yang strategis dan mudah untuk dijangkau, hal tersebut sangat mendominasi sebagai tempat untuk mendirikan toko, warung, dan sebagainya.

Pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang merupakan pasar malam tersebut memiliki peran dan pengaruh terhadap masyarakat yang ada disekitarnya. Masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk mencari rezeki dengan berjualan dipasar malam tersebut. Pada malam hari banyak masyarakat berkunjung di tempat tersebut, maka perekonomian para pedagang otomatis meningkat. Maka dari

itu pemilik lapak pasar malam berinisiatif untuk menyediakan tempat khusus untuk para pedagang dengan membuat stand untuk berjualan. Adanya penyediaan stand tersebut agar pasar kelihatan rapi dan tertata lebih indah. Bagi pedagang yang ingin berjualan dipasar tersebut, terlebih dahulu harus menyewa stand kepada pemilik lapak. . Dalam hal sewa menyewa lapak di Desa Ujung Gading tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa yang lainnya, di mana pihak pedagang sebagai musta'jir (penyewa) dan pihak pemilik pasar sebagai mu'jir (pemberi sewa). Objek yang disewakan adalah stand untuk berjualan dan juga lapangan lapak untuk tempat permainan.

Praktek sewa menyewa lapak pasar malam yang ada di Desa Ujung Gading. Pasar malam tersebut menyediakan beberapa stand untuk di sewakan bagi pihak yang ingin berjualan. Pelaksanaan akad sewa menyewa dilakukan antara pihak menyewa lapak dengan pihak pemilik lapak. Bagi siapa saja yang ingin berjualan maka harus menyewa dan membayar uang sewa stand tersebut terlebih dahulu. Ukuran perstand yang disewakan itu sudah dibuat perkotak sehingga lebar dan luasnya itu sama. Dalam sewa menyewa lapak ini, a'jir dan mustakjir melakukan akad perjanjian secara lisan yang mana sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Mengenai perjanjian tersebut, sistem pembayaran diawal akad yaitu penyewa langsung membayar uang tunai sewa lapak selama 1 tahun sebesar 5 juta seperti penjualan balon, odong-odong dan sebagainya itu terdapat tambahan harga. Tambahan harga juga berbeda-beda tergantung besar kecilnya alat permainan dan luas lapak yang dipaka.[42]

[42] Observasi, di Pasar Malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 25 Juni 2023.

Namun dalam prakteknya, sewa menyewa lapak di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang tersebut di duga terdapat penyelewengan, salah satunya terkait adanya perubahan pembayaran listrik secara sepihak harga secara sepihak yang awalnya ditanggung oleh pemilik lapak namun ditengah-tengah perjalanan tiba-tiba berubah yaitu pembayaran listrik semua dibebankan kepada pihak yang menyewa tambahan lapak dan harus dibayarakan setiap seminggu sekali.[43]

Terkait harga sewa stand tersebut telah ditetapkan sebesar Rp. 5 juta pertahun. Untuk hal tersebut, semua ukuran per stand sudah dibuat sama luasnya. Apabila pihak penyewa ingin menambah tempat penyewaan, seperti pihak penyewa yang sudah menyewa stand dan sekaligus ingin menambah lapangan pasar untuk disewa sebagai tempat permainan, maka juga dikenai tambahan pembayaran tersendiri tergantung luas lapangan pasar yang disewa. Tambahan harga itu sudah ditentukan terkait luas lapangan yang disewa. Kalau permainan cukup besar dan membutuhkan tempat yang luas maka harga sewanya juga lebih besar dan kalau permainan hanya membutuhkan lapangan yang tidak luas harga yang diberikan tidak begitu besar.

Dalam kesepakatan awal yang telah dibuat dalam sewa-menyewa lapak tersebut, pemilik lapak sudah menentukan besarnya biaya yang harus dibayarkan pertahun. Bagi pihak penyewa yang sudah menyewa stand dan menambah lapangan pasar untuk disewa sebagai tempat permainan mengalami adanya perubahan harga secara sepihak. Pada pihak penyewa stand yang sekaligus menyewa lapangan pasar untuk tempat penjualan baju yang tambahan harga awalnya sudah ditentukan sebesar Rp. 5 juta atau pertahun tiba- tiba mengalami perubahan harga oleh pemilik pasar tanpa adanya

[43] Observasi, di Pasar Malam Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 21 Juli 2023.

kesepakatan. Pemilik jualan baju tersebut tidak jadi membayar Rp. 5 juta atau pertahun, tetapi pemilik jualan baju tersebut disuruh membayar semua listrik penyewa stand yang lainnya, padahal di awal perjanjian terkait pembayaran listrik sudah ditanggung oleh pemilik pasar.[44] Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Erni sebagai berikut:

> "Jadi pada awalnya saya sudah menyewa stand harga standkan sudah ditetapkan sebesar Rp. 5 juta pertahun, namun selain saya menyewa stand saya juga menyewa lapangan lapak yang saya gunakan untuk tempat jualan baju, nah pada awalnya kata pemilik lapak harga tamabahan sewa lapangan lapak itu pertahun itu sebesar Rp. 5 juta pertahun, karena jual baju itu kan memang agak luas jadi harganya juga cukup banyak, sehingga saya itu setiap tahun bayar Rp.5 juta, namun itu hanya berjalan tiga bulan saja mbak, bulan selanjutnya itu tiba-tiba ada perubahan harga sepihak ibu oleh pihak pemberi sewa, saya tiba-tiba disuruh membayar listrik penyewa stand lainnya mbak dan pembayarannya itu sebesar Rp. 100.000 perminggu ibu, padahal kan pada awalnya terkait listrik itu sudah ditanggung pemilik lapak mbak namun tiba- tiba dibebankan kepada pihak yang menyewa tambahan lapangan lapak sebagai tempat jualannya."

Hal tersebut tidaklah terjadi pada satu penyewa saja, melainkan hal tersebut juga terjadi kepada penyewa yang lainnya. Penyewa lapak lainnya yang menambah lapak untuk permainan anak mengalami adanya perubahan harga. Pemilik lapak merubah harga tersebut karena kurangnya keuntungan yang didapatkan, sehingga pemilik lapak berinisiatif untuk menambah harga sewa, adanya penambahan harga tersebut oleh pemilik lapak bertujuan untuk pembayaran listrik pasar. Walaupun pemilik

[44] Ibu Erni, *Hasil Wawancara*, Pasar Malam Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat 25 Juni 2021.

lapak menyadari akan hal yang dilakukan itu tidaklah sesuai dengan kesepakatan awal. Pemilik lapak dengan Bapak Suhatman mengatakan: "Meskipun hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal terkait harga pembayaran, namun perubahan harga ini saya lakukan karena kurangnya keuntungan yang didapatkan, dan terkait perubahan harga tidak hanya terjadi pada pemilik jualan baju saja, tetapi perubahan harga terjadi kepada semua pihak penyewa yang menambah lapak untuk tempat permainan."[45]

Adanya perubahan harga yang terjadi pada pihak penyewa yang menambah lapangan lapak sebagai tempat permainan yang semuanya mengalami perubahan harga secara sepihak. Pihak penyewa yang menambah lapangan pasar sebagai tempat permainan yang awalnya besar pembayaran sudah ditentukan diawal perjanjian, tiba-tiba semua mengalami perubahan harga secara sepihak. Pihak yang menambah sewaan lapak sebagai tempat permainan disuruh membayar semua listrik penyewa stand lainnya dan pembayaran listrik dibayarkan setiap perminggu sekali. Perubahan harga tersebut terjadi tanpa adanya kesepakatan bersama antara pemilik lapak dengan penyewa lapak. Selain terjadinya pada penjual baju, perubahan harga tersebut terjadi pada penyewa lapangan lapak untuk penjualan makanan. Pada awalnya kesepakatan terkait penambahan lapak untuk penjual makanan, harga sewa pertahun sudah ditentukan sebesar Rp. 5 juta pertahun, tetapi hal tersebut hanya berlangsung selama tiga bulan, pembayaran selanjutnya mengalami perubahan yang awalnya sebesar Rp. 5 juta pertahun perubahannya menjadi Rp. 100.000 perminggu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibuk Nur Arma sebagai berikut:

[45] Bapak Suhatman, *Hasil Wawancara,* Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat 30 Juni 2023.

> “Saya itu selain menyewa stand saya juga menyewa lapangan lapak, sewa lapangan lapak yang saya digunakan untuk jualan makanan, stand jualan makanan ukurannya itu tidak begitu besar. Pada awalnya mengenai perjanjian penyewa lapangan lapak itu pertahunnya seharga Rp. 5 juta. Lalu di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada perubahan secara sepihak, pembayaran sewa stand lapangan lapak pasar malam itu pertahunnya Rp. 5 juta tetapi itu hanya berjalan dalam tiga bulan saja untuk selanjutnya saya disuruh untuk membayar Rp. 100.000 perminggu untuk pembayaran listrik.

Adanya perubahan harga yang terjadi pada pihak penyewa yang menambah lapangan lapak sebagai tempat permainan itu semuanya mengalami perubahan harga secara sepihak. Pihak penyewa yang menambah lapangan pasar sebagai tempat permainan yang awalnya besar pembayaran sudah ditentukan di awal perjanjian, tiba-tiba semuanya mengalami perrubahan harga secara sepihak. Pihak yang menambah persewaan lapak sebagai tempat permainan disuruh membayar semua listrik penyewa stand lainnya dan pembayaran listrik dibayarkan setiap seminggu sekali. Perubahan harga tersebut terjadi tanpa adanya kesepakatan bersama antara pemilik lapak dengan penyewa lapak. Selain terjadi pada pemilik jualan baju, perubahan harga tersebut terjadi pada penyewa lapangan lapak untuk permainan odong-odong. Pada awal kesepakatan terkait penambambahan lapak untuk permainan odong-odong, harga sewa pertahun sudah ditentukan sebesar Rp. 5 juta pertahun, tetapi hal tersebut hanya berlangsung selama tiga bulan saja, pembayaran

yang selanjutnya mengalami perubahan yang awalnya sebesar Rp. 5 juta pertahun .[46] Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Fajar sebagai berikut:

> "Saya itu selain menyewa stand saya juga menyewa lapangan lapak, sewa lapangan lapak saya gunakan untuk permainan, mainannya itu adalah permainan odong-odong yang ukurannya itu tidak begitu besar. Pada awalnya mengenai penyewaan lapangan lapak itu saya dikenai tambahan harga sebesar Rp. 1,000.000 pertahun, lalu ditengah-tengah perjalan tiba-tiba ada perubahan secara sepihak, pembayaran Rp.1. 000.000,- itu hanya berjalan tiga bulan saja untuk selanjutnya saya disuruh membayar Rp. 100.000,- perminggu yang katanya untuk pembayaran listrik."

Dari wawancara di atas, pihak penyewa yang menambah lapangan pasar sebagai tempat permainan yang awalnya pembayaran sudah ditentukan diawal perjanjian tiba-tiba semuanya mengalami perrubahan harga secara sepihak. Pihak yang menambah lapangan lapak sebagai tempat permainan disuruh membayar semua listrik penyewa stand lainnya dan pembayaran listrik dibayarkan setiap seminggu sekali. Perubahan harga tersebut terjadi tanpa adanya kesepakatan bersama antara pemilik lapak dengan penyewa lapak.

Perubahan harga pembayaran tersebut dilakukan secara paksa karena banyak pihak yang merasa keberatan dengan harga yang ditetapkannya. Meskipun banyak penyewa yang merasa kecewa atas terjadinya perubahan harga, penyewa tersebut tetap menerima meski dengan berat hati. Penyewa masih tetap ingin berjualan di

[46] Bapak Fajar, *Hasi Wawancara,* Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat 26 Juli 2023.

pasar tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh penyewa lapak sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Arman bahwa:

> " Sebenarnya banyak penyewa lain yang merasa kecewa, karena adanya perubahan harga yang dilakukan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dan perubahan itu dilakukan secara paksa oleh pemilk lapak. Meskipun saya dan penyewa lainnya di awal perubahan itu merasa kecewa, tetapi saya dan juga penyewa lainnya akhirnya ya tetap menerima meski dengan berat hati, karena kami juga tetap ingin memenuhi kebutuhan ekonomi dengan tetap berjualan disitu."

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbedaan harga antara toko yang satu dengan toko yang lain pada biaya sewa lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Ekonomi masyarakat di desa Ujung Gading berkembang jauh lebih baik seiring dengan perkembangannya zaman. Banyak masyarakat yang memulai berbisnis sebagai besar lahan Desa Ujung Gading digunakan untuk bercocok tanam tetapi sebagian lahan juga digunakan untuk usaha yang lainnya seperti toko, konter (toko hp), warung, bengkel dan lain-lain. Dilihat dari keadaan ekonomi masarakat desa Ujung Gading tergolong berkecukupan.

Ulama fiqh mendeskripsikan syarat-syarat dalam penetapan harga yakni: barang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat luas, terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga barang dagangan mereka, pemerintah itu merupakan pemerintahan yang adil, pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan melakukan kerjasama dengan para pakar ekonomi, penetapan harga ini harga memikirkan para pedagang dan pembeli agar tidak merugikan salah

satu pihak, karena para pedagang juga mencari keuntungan, harus adanya pengawasan dari pihak pemerintah baik menyangkut harga barang maupun stok barang sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang khususnya mendekati hari-hari besar, pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang tentunya masih berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan bersama.

Hadis Rasulullah Saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

" Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna; mewartakan kepada kami Hajjaj; mewartakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit, dari Anas bin Malik, dia berkata: "Ya Rasulullah harga barang telah naik, karena itu ditetapkan harga-harga bagi kami." Kemudian beliau menjawab:" Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, yang menahan yang melapangkan yang memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap agar berjumpa Tuhanku dalam keadaan tidak seorangpun yang menggugatku lantaran penganiayaan pada darah atau hartanya."

Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad yang benar yaitu akad yang disepakati antara kedua belah pihak tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan. Berkaitan dengan ini kompilasi hukum ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek-aspek dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, salah satunya yaitu aspek kejujuran. Kompilasi hukum islam sangat menentang ketidak jujuran, kecurangan bahkan praktek pemaksaan dari semua perbuatan yang mengandung ketidak jelasan.

Mengenai perbedaan harga antara lapak satu dengan lapak yang lain, yang mana pembayaran yang menyewa lapak itu pertahun sebesar Rp. 5 juta dan sudah termasuk pembayaran listrik, namun pada kenyataan setelah 3 bulan masa sewa lapak berjalan, pihak pemilik lapak meminta uang pembayaran listrik sebesar Rp. 100.000 perminggu, sementara perjanjian sewa lapak di awal tidak di sebutkan pembayaran listrik untuk setiap minggunya. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah syarat sah ijarah upah (ujrah) harus jelas, tidak boleh adanya unsur gharar (ketidak jelasan harga) karena dalam penetapan harga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Mengigat pasar malam ini merupakan pasar malam namun ada beberapa penyewa stand yang berjualannya itu di pagi hari. Penyewa stand yang berjualan di pagi hari biasanya dimulai jam 06.30 sampai jam 03.00 penyewa stand tersebut yang berjualan di pagi hari umumnya adalah menjual berbagai macam makanan seperti lontong, pecal, gorengan. Pihak penyewa yang berjualan di pagi hari fasilitasnya sama dengan yang berjualan dimalam hari. Namun ada perbedaan penggunaan listriknya.[47] Para penyewa stand yang berjualan di pagi hari kebanyakan tidak tidak menggunakan listrik karena makanannya kebanyakan memakai hasil olahan tangan dan hannya memerlukan gas untuk memasak.Namun terkait kompor gas itu bukan merupakan fasilitas yang disediakan, para pedagang terkait alat masak membawa dari rumahnya masing-masing.

[47] Observasi, di Pasar Malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 25 Juli 2023.

Dilihat dari pemakaian listrik, pihak penyewa yang berjualan di pagi hari kebanyakan tidak menggunakan listrik. Hal tersebut membuat pihak penyewa yang berjualan di pagi hari meminta keringanan pembayaran pertahun kepada pihak pemilik lapak. Pemilik lapak akhirnya meringankan pembayaran pertahun yang awalnya Rp. 5 juta pertahun menjadi Rp. 4 juta pertahun.[48] Seperti yang dikatakan pihak penyewa lapak pasar malam dengan bapak Andi :

> "Pada awal sewa lapak semua penyewa terkait pembayaran pertahun sudah ditetapkan Rp. 5 juta pertahun, namun karena ada penyewa yang jualan dipagi hari dan meminta keringanan harga maka setelah itu pihak pemilik lapak berfikir untuk menetapkan harga, setelah berfikir pemilik lapak akhirnya membuat harga yang berbeda antara yang berjualan di malam hari harga pertahun tetap sedangkan penyewa yang berjualan di pagi hari harga menjadi Rp. 4 juta pertahunnya."

Pihak penyewa stand yang berjualan di malam hari banyak yang merasa tidak adil, penyewa stand yang berjualan di malam hari merasa keberatan, meskipun penyewa stand yang berjualan di pagi hari tidak banyak memakai listrik tetapi luas stand dan fasilitas yang diberikan itu sama. Perbedaan harga tersebut membuat para pihak penyewa yang berjualan di malam hari merasa tidak adil, selain fasilitasnya sama, namun terkait biaya sewa lapak di awal kesepakatan pemilik lapak sudah menetapkan biaya pertahun itu dibuat sama besar Rp. 5 juta pertahun. Perbedaan hargatersebut terbentuk tanpa adanya kesepakatan bersama dengan penyewa lapak yang berjualan dimalam hari, perubahan harga tersebut hanya terjadi antara pemilik

[48] Andi, *Hasi Wawancara,* Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 30 Juni 2023

lapak dengan penyewa lapak yang berjualan dipagi hari.[49] Seperti yang dikatakan penyewa lapak dengan ibuk herlina:

> "Adanya perbedaan harga sewa itu sebenarnya banyak penyewa lain yang merasa tidak adil, karena luas stand dan fasilitas yang diberikan itu sama tetapi harganya tetap berbeda ,listrik juga tidak seberapa tapi perbandingan harganya itu lumayan banyak. Di awal kesepakatan terkait harga juga sudah dibuat sama,seharusnya kalok mau ada perbedaan harga harus dilakukan musyawarah bersama dulu agar tidak ada pihak penyewa yang merasa tidak adil."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh penyewa lapak lainnya, terkait penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik lapak itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan di awal. Di awal kesepakatan mengenai harga sudah di tentukan sebesar Rp. 5 juta pertahun namun ditengah-tengah tiba-tiba harga berbeda antara penyewa yang berjualan di pagi hari dan harga menjadi sebesar Rp. 4 juta pertahun sedangkan yang jualannya di malam hari harga tetap sama sebesar Rp. 5 juta pertahun. Adanya perbedaan harga tidak di katakana di awal perjanjian, sehingga banyak menyewa yang tidak mengetahui adanya perbedaan harga. Hal tersebut menyebabkan penyewa lapak ada yang merasa diperlukan tidak adil. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ali Hepdi sebagai berikut:

> " Pemilik lapak itu dalam menetapkan harga saya rasa tidak adil, karena seharusnya dalam menetapkan harga itu harus ada kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan kecemburuan satu sama lain. Apabila dalam menetapkan harga itu dilakukan secara bersama yaitu penyewa yang berjualan malam dan pagi diajak untuk

[49] Herlina, *Hasil Wawancara,* Pasar Malam Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 2 Agustus 2023.

bermusyawarah dan oleh pemilik lapak diberikan penjelasan di awal pasti pihak yang berjualan di malam hari bisa menerima perbedaan harga yang terjadi."

Penetapan harga hanya ditentukan oleh pemilik lapak dan penyewa lapak yang berjualan di pagi hari, sehingga penyewa lapak yang berjualan di malam hari merasa tidak adil. Dalam menetapkan harga yang hanya dilakukan sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama dapat menimbulkan ketidak adilan antara penyewa sati dengan penyewa lainnya. Seperti yang dikatakan oleh pihak pemilik lapak ibu Suraidah sebagai berikut :

" Karena pada awal kesepakatan itu pemilik lapak sudah mengatakan bahwa harga yang dibuat sama pertahunnta, namun ditengah-tengah berjalannya waktu tiba-tiba harga berbeda antara penyewa yang jualan di pagi dan penyewa yang berjualan di malam hari. Dalam menetapkan harga itu harusnya dilakukan secara bersama, karena apabila hanya ditentukan secara sepihak saja membuat adanya kecemburuan atau keributan dengan pihak lainnya yang menyewa lapak pasar malam itu."[50]

Perbedaan harga di lakukan oleh pemilik lapak karena untuk kemaslahatan bersama dan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari perbedaan harga tersebut ditetapkan oleh pemilik lapak agar tidak ada keributan antara penjual yang jualan di malam hari dengan penjual yang berjualan dipagi hari. Penyewa yang berjualan dipagi hari itu tidak banyak yang memakai listrik, berbeda dengan yang berjualan di malam hari, selain banyak yang menggunakan lampu penerang juga banyak menggunakan listrik. Pada awalnya terjadi perbedaan harga antara penyewa yang berjualan pagi dan penyewa yang berjualan di malam hari banyak para pihak

[50] Suraidah, *Hasil Wawancara,* Pasar Malam Ujung Gding Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 10 Agustus 2023,

yang kecewa, namun setelah adanya penjelasan dari pihak pemilik lapak akhirnya para pihak yang berjualan di malam hari menerima perbedaan harga tersebut. Seperti yang di katakana oleh pemilik lapak bapak Idris sebagai berikut:

> " Terkait harga sudah saya fikirkan terlebih dahulu, hal tersebut bertujuan unruk kemaslahatan bersama, penyewa yang berjualan di malam hari banyak sekali yang memakai listrik selain itu banyak juga lampu penerang sedangkan penyewa yang jualan di pagi itu jarang yang menggunakan listrik, maka dari itu untuk menghindari perselisihan saya sudah ditetapkan terkait harga saya yang buat berbeda. Penyewa yang berjualan dimalam hari setelah saya kasih penjelasan akhirnya mereka menerima adanya perbedaan harga tersebut."

Pemilik lapak menetapkan harga sebesar Rp. 5 juta pertahun bagi penyewa yang berjualan di malam hari, karena penyewa yang berjualan di malam hari kebanyakan dari mereka menggunakan banyak listrik. Berbeda dengan penyewa yang berjualan di pagi hari kebanyakan mereka tidak menggunakan listrik, maka dari itu pemilik lapak menetapkan biaya sewa pertahun bagi penyewa yang berjualan di pagi hari sebesar Rp. 4 juta pertahun. Meskipun di awal terjadinya perbedaan harga banyak pihak yang merasa tidak adil, kemudian setelah ada penjelasan dari pemilik lapak akhirnya pihak penyewa menerima perbedaan harga tersebut. Perbedaan harga tersebut terjadi agar tidak ada perselisihan dikemudian hari dan untuk kemaslahatan bersama.

D. Teori Wansperestasi

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Terdapat tiga bentuk wanprestasi:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Seorang debitur yang memiliki suatu prestasi terhadap si kreditur tetapi tidak melaksnakan prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan. Dalam hal ini debitur telah dikatakan wanprestasi jika hal itu dilakukan dengan kesadaran atau tanpa suatu keadaan yang memaksa debitur tidak dapat melaksanakan kewajibanya.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Seperti yang sudah di contohkan di atas bahwa pelaksaan mengenai waktu prestasi adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah di tetapkan didalam perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi dapat dikatan prestasi sesuai dengan keingina si kreditur.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.

Debitur melaksanakan suatu prestasi tetapi dalam pelaksaannya debitur melaksanakan apa yang berbeda dari isi perjanjian.

2. Keadaan Memaksa *(force majeure)*

Keadaan Memaksa dimana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat

menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.Beberapa pakar membahas akibat hukum dari keadaan memaksa.

Istilah yang digunakan untuk menyebut *force majeure/overmacht* adalah keadaan memaksa meskipun para ahli hukum telah menerjemahkan terminologi itu dengan keadaan memaksa, dalam pembahasan masih juga menggunakan terminologi *overmacht*.

.Dasar ajaran *force majeure/overmacht* subjektif adalah difficultas (kebalikan dari impossibilitas). Misalnya : Sesudah diadakan perjanjian jual-beli secara tiba-tiba, terjadi kenaikan harga barang yang tidak dapat diduga lebih dahulu sehingga untuk memenuhi kewajibannya melever barang, si penjual harus membeli barang yang harus di-lever tersebut dengan harga yang sangat tinggi namun kedua ajaran di atas tidak ada artinya jika tidak dilengkapi dengan ajaran risiko.Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa *(force majeure atau overmacht).*

Perbedaan wawancara ibu Erni dengan wawancara ibu Nur Arma adalah wawancara ibu Erni mengenai masalah tentang menyewa stand dan menyewa lapangan lapak yang digunakan untuk tempat jualan baju, pada awalnya kata pemilik lapak harga sewa lapak itu sebesar Rp. 5 juta pertahun, karna tempat jualan baju itu lumayan luas jadi harganya cukup besar, namun itu hanya berjalan 3 bulan, bulan selanjutnya tiba-tiba disuruh membayar listrik dan pembayaran listrik ini Rp. 100.000 perminggu. Sedangkan wawancara ibu Nur Arma

mengenai masalah tentang penyewa stand dan penyewa lapangan lapak sebagai tempat jualan makanan ukurannya itu tidak besar. Pada awalnya perjanjian pemilik lapak dengan penyewa lapak sebesar Rp. 5 juta pertahun, itupun hanya berjalan 3 bulan saja dan disuruh membayar listrik perminggu dan saya sendiri merasa merugi karna di awal perjanjian tidak ada membayar listrik.

Perbedaan wawancara bapak Fajar dengan wawancara bapak Arman adalah wawancara bapak Fajar mengenai masalah tentang saya penyewa stand dan lapangan lapak yang saya gunakan itu untuk permainan odong-odong yang ukurannya tidak begitu besar dan saya penyewa lapangan lapak itu sebesar Rp. 5 juta pertahun dan saya sudah membayar Rp. 5 juta pertahun ada lagi tambahan pembayaran dari saya pertahunnya Rp. 1.000.000 dan saya tidak menerima perlakuan pemilik lapak tersebut. Karna permainan odong-odong ini tidak begitu banyak untungnya dan saya merugi sekali. Sedangkan wawancara bapak Arman mengenai masalah tentang banyaknya penyewa lain yang merasa kecewa, karena adanya perubahan harga dan penambahan harga tanpa ada perjanjian di awal dan musyarah terhadap penyewa lapangan lapak pasar malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Perbedaan wawancara bapak Andi dengan wawancara ibu Herlina adalah wawancara bapak Andi mengenai masalah tentang pada awal perjanjian sudah ditetapkan pembayaran sewa stand lapangan lapak pasar malam di Desa Ujung Gding Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 5 juta pertahun, namun karna ada penyewa yang berjualan di pagi hari dan penjualan yang di pagi hari itu meminta keringan pembayaran stand lapangan

lapak pasar malam dan pemilik stand lapangan lapak pasar malam memberikan keringan yang berjualan di pagi hari dan yang berjualan di malam hari tidak menerima itu dan yang berjualan dimalam hari merasa tidak adil karan ada perbedaan harga pembayaran stand lapangan lapak pasar malm tersebut. Sedangkan wawancara ibu Herlina mengenai masalah tentang karna adanya perbedaan harga sewa banyak penyewa lain merasa tidak adil, karena luas stand dan fasilitasnya tang di berikan itu sama tetapi harganya tetap berbeda dan dan pembayaran listrik juga berbeda. Seharusnya pemilik lapak mau mengubah perbedaan harga harus di musyarahkan bersama kepada penyewa terlebih dahulu agar tidak ada pihak penyewa yang merasa di dirugikan atau tidak adil.

Perbedaan wawancara bapak Ali Hepdi dengan wawancara ibu Suraidah adalah wawancara bapak Ali Hepdi mengenai masalah tentang pemilik lapak itu dalam menentukan harga saya rasa tidak adil, karena saya rasa dalam menentukan harga itu harus ada kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan kecemburuan dan keributan satu sama lainnya. Apa bila yang berjualan di pagi hari dan yang berjualan di malam hari harus musyawarah dan pemilik lapak harus memberikan penjelasan di awal pasti pihak yang berjualan di malam hari pasti menerima perbedaan harga. Sedangkan Suraidah mengenai masalah tentang pada awalnya kesepakatan itu pemilik lapak sudah mengatakan bahwa harga yang dibuat sama pertahunnya, tiba-tiba ditengah perjalanan ada perbedaan harga sama yang berjualan di pagi hari dan di malam hari. Seharusnya penetapan harga dilakukan secara bersama supaya tidak ada kecemburuan dan permasalahan harga dengan pihak yang menyewa stand lapangan lapak pasar malam.

Perbedaan wawancara pemilik lapak bapak Idris mengenai masalah tentang terkait perbedaan harga atau perubahan harga yang dibuatnya, penjelasan dari pemilik stand lapangan lapak pasar malam kepada penyewa mengenai perbedaan harga kepada berjualan di pagi hari dan berjualan di malam hari suapaya tidak ada lagi kecemburuan, penyewa yang berjualan di malam hari banyak yang memakai listrik selain itu banyak juga lampu penerang sedangkan yang jualan di pagi hari itu jarang menggunakan listrik. Maka untuk menghindari perselisihan saya sudah di tetapkan terkait perbedaan dan berjualan di malam hari saya menjelaskan kepada penyewa pada yang berjualan malam hari menerima adanya perbedaan harga tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengalami kesimpulan bahwa :

1. Perubahan harga yang terjadi di pasar malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupate Pasaman Barat tersebut terjadi pada penyewa yang menambah lapangan lapak untuk tempat permainan saja, sedangkan untuk penyewa lainnya yang tidak menambah lapangan lapak untuk permainan tidak mengalami perubahan harga. Perubahan harga yang terjadi pada penyewa yang menambah lapangan untuk tempat permainan tersebut belum sesuai dengan hukum kompilasi ekonimi syarah, karena hal tersebut melanggar salah satu syarat sah *ijarah* dan juga belum sesuai dengan dasar hukum penetapan harga. Dalam syarat sah *ijarah* harus ada kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Di dalam dasar hukum penetapan harga, dalam melakukan transaksi harus didasarkan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada rasa terpaksa. Perubahan harga yang terjadi di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang tersebut terdapat ketidak relaan dari pihak yang menambah lapangan lapak untuk tempat permainan, dikarenakan perubahan harga tersebut terjadi secara sepihak dan dilakukan secara terpaksa di tengah berlangsungnya transaksi sewamenyewa.
2. Perbedaan harga yang terjadi di pasar malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat tersebut sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat penetapan harga oleh hukum kompilasi ekonomi syariah. Sewa-menyewa lapak

tersebut sudah sesuai dengan penetapan harga yaitu sesuai konsep penetapan harga oleh pemerintah yang adil , sehingga hukumnya diperbolehkan. Penetapan harga yang terjadi dalam sewa-menyewa lapak di pasar malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakatnya, dalam hal ini agar tercipta keadilan bersama. Pemilik lapak dalam menetapkan harga sebelumnya sudah memikirkan para penyewa agar tidak merugikan salah satu pihak. Meskipun di awal terjadinya perbedaan harga, pihak penyewa yang berjualan di malam hari merasa tidak adil dan kecewa, namun pada akhirnya pihak penyewa yang berjualan di malam hari menerima adanya perbedaan harga tersebut setelah adanya penjelasan dari pemilik lapak.

B. Saran

1. Bagi *mu'jir* (pemilik lapak pasar malam) seharusnya dalam menetapakan harga harus dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu. Pemilik lapak seharusnya menyediakan kwitansi untuk diberikan kepada para pihak penyewa dan alangkah baiknya kwitansi tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakad. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.
2. Bagi *musta'jir* (penyewa lapak) agar tetap melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama dan bisa lebih menanamkan jiwa toleransi satu sama lain agar tidak merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

A.Mas'adi Ghufron, *Figh Muamalah Kontekstual*, (Semarang : Rajawali Pers, 2002)

Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006),

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencanan, 2012),

Ade Mareta Handayani, *" Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Sewa Lapak Desa Gunung Agung Keamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat "* Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003),

Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan, Cet Ke-1* (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2006)

Akhmad Faroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018)

Akhmad Farroh Hasan, *Figih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),* UIN- Malik Malang Press, 2018

Ali Imran Sinaga, *Fiqih* 1, (Bandung, itapustaka Media Perintis, 2011)

Andi, *Hasi Wawancara,* Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 30 Juni 2023

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Persada, 2003)

Bapak Fajar, *Hasi Wawancara,* Pasar Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat 26 Juli 2023.

Bapak Suhatman, *Hasil Wawancara,* Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat 30 Juni 2023.

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003)

Darwis Harahap dkk, *Fiqih Muamalah* 1, (Medan, CV. Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021)

Dea Paramita Adriani, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pemungutan Sewa Menyewa Lapak Pasar Tradisional, "* Jurnal Riset Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, (2021)

Euis Amalia, " Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Prespektif Ekonomi Islam, "*Jurnal Al- Istisqhad*, (Januari, 2013)

Fauzan Nur ," Analisis Praktek Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam ," *Skripsi* (UIN AR-RANIRY, Darussalam Banda Aceh , 2019)

Firman Setiawan, " *Al- Ijarah Al- A'mal Al- Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*," Dinar, 2 (2015)

Fithriana Syarqawie, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin : IAIN ANTASARI PRESS, 2015)

Hafsah, *Fiqih,* (Bandung, Citapustaka Mediasi Perintis, 2011)

Herlina, *Hasil Wawancara,* Pasar Malam Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 2 Agustus 2023.

Ibu Erni, *Hasil Wawancara,* Pasar Malam Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat 25 Juni 2021.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial*,*(Kuantitatif dan kualitatif*)..,hlm.231.

Lia Lukita Heryanti ," *Akad Sewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Jalan Proklamator Bandara Jaya Lampung Tengah* ," *Skripsi* (IAIN Metro, Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung, 2019)

M.Ali Hasan,"*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,"(*Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2004),

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008)

Muhammad Iqbal Fauzan dkk, "*Tinjauan Fiqih Mauamalah terhadap Sewa Menyewa Lapak di Pasar Banjar Kabupaten Bandung,* " Jurnal Universitas Islam Bandung, Iindonesia, (2023)

Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:1999)

Nadhira Wahyu Adityarini dan Lanang Sakti, "*Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," Jurnal Fundamental Justice*, 2 (2020)

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2003)

Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)

Observasi, di Pasar Malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 25 Juni 2023.

Observasi, di Pasar Malam Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 25 Juli 2023.

Observasi, di Pasar Malam Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 21 Juli 2023.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)

Rachmat Syafe, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001)

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Rachmat, S.S. Seomadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa* (Gramedia Jakarta, 2010)

Rozalinda, *Ekonomi Islam* : *Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta, Pena Ilmu dan Amal, 2006), *jilid* 4, 205.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985

Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alvabeta, 2010)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian,* (Bandung : Pustaka Media, 2006)

Suraidah, *Hasil Wawancara,* Pasar Malam Ujung Gding Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, 10 Agustus 2023,

Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)

Wawancara, Halomoan, Ujung Gading Pasaman Barat, 1 Juli 2023.

Yuni Herlina dan Hellen Lastfitriani,*Kajian Hukum Islam Tentang Wnsprestasi (Ingkar Janji),* Vol XVII No. 1 Juni, Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2017)

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pemilik Lapak

1. Beberapa stand yang ada dipasar malam ini?
2. Siapa saja yang menyewa stand di pasar malam ini?
3. Berapa tarif yang harus dibayar para penyewa stand?
4. Berapa jangka waktu bagi penyewa stand setelah membayar tarif?
5. Apakah yang menyebabkan penambahan bayaran pada setiap stand?

B. Wawancara Dengan Penyewa Stand

1. Apakah ibu/bapak sudah lama menyewa stand di lapak pasar malam ini?
2. Berapakah tarif yang harus dibayarkan untuk menyewa stand di lapak pasar malam ini?
3. Berapa lamakah jangka waktu penyewa stand di lapak pasar malam ini setelah melakukan pembayaran?
4. Berapakah penambahan tarif yang di bapak/ibu bayarkan?
5. Apakah bapak/ibu sudah pernah protes dengan penambahan tarif tersebut?
6. Bagaimanakah resfon dari pemilik lapak atas protes yang telah dilakukan?
7. Apakah bapak/ibu rela dengan adanya penambahan biaya sewa stand tersebut?

CURICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

A. Data Pribadi

Nama	: Risca Hannifa
Nim	: 1910200005
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	: Roba Julu, 19 Januari 2000
Umur	: 24 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Roba Julu
No. Telp	: 08226719468
E-mail	: riscahannifa507@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Ikhwan
Nama Ibu	: Zainab

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2008-2013	: SD Negeri 06 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2013-2016	: SMP Negeri 05 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2019	: MAN 2 Pasaman Barat
Tahun 2019-Sekarang	: UIN SYAHADA Padangsidimpuan



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website : https://uinsyahada.ac.id

Nomor : B-897 /Un.28/D/TL.00/06/2023 19 Juni 2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : ***Permohonan Riset.***

Yth, Kepala Desa Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Risca Hanifah
NIM	: 1910200005
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Roba Julu Pasaman Barat
No Telpon/ HP	: 082169149481

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul" Kompilasi Hukum Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam Di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG
WALI NAGARI UJUNG GADING
Jl. Nusantara Barat Telepon 0753-470002 UJUNG GADING

REKOMENDASI
No. 140/2662 /WN.UG/ 2023

TENTANG
IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali mad Addary Padang Sidimpuan tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Riset An. RISCA ANIFAH dengan ini kami Menyatakan tidak keberatan atas maksud melakukan Riset bagi ahasiswa tersebut di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ng dilakukan oleh Saudari :

Nama	: **RISCA HANIFAH**
NIM	: 1910200005
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Robajulu – Pasaman Barat
No. Telepon/ Hp.	: 082169149481
Judul Penelitian	: **"Kompilasi Hukum Syariah terhadap Praktek Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat"**
Lama Penelitian	: 1 (satu) bulan
Lokasi Penelitian	: Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat

ngan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan riset.
2. Dalam melakukan riset yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan ini serta melaporkan diri sebelum dan sesudah riset kepada Wali Nagari Ujung Gading dan Camat Lembah Melintang.
3. Mengirimkan hasil riset tersebut kepada Kantor Wali Nagari Ujung Gading Cq. Kasi Pemerintahan.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Nagari Ujung Gading dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, Maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi Izin Riset ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Gading, 14 Juli 2023

Pj. Wali Nagari Ujung Gading

WALI NAGARI UJUNG GADING

(SARIPADA, S.Pd.I)
NIP. 196909142012121005

nbusan : *Disampaikan kepada Yth.*

1. *Bupati Pasaman Barat Cq. Kabag Pemerintahan Nagari di Simpang Empat*
2. *Camat Lembah Melintang di Ujung Gading*
3. *Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan*